

**LAPORAN KEUANGAN**  
**BAGIAN ANGGARAN 018.08**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**  
**(AUDITED)**

Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2013



Alamat Kantor:

**KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GD. D, LT. 8**  
**JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

*Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian* adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2014  
Direktur Jenderal Prasarana dan  
Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto,MS.DAA  
NIP. 196010241987031001

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2014  
Direktur Jenderal Prasarana dan  
Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto,MS.DAA  
NIP. 196010241987031001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
RINGKASAN .....	xi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xiv
II. NERACA .....	xv
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
A. PENJELASAN UMUM.....	1
A.1 DASAR HUKUM .....	1
A.1 KEBIJAKAN TEKNIS SATKER DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.....	1
A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	8
A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	9
(1) Pendapatan.....	9
(2) Belanja.....	9
(3) Aset.....	10
(4) Kewajiban.....	13
(5) Ekuitas Dana .....	14
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	14
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap.....	14
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	15
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah .....	15
B.2 Belanja Negara .....	17
B.2.1 Belanja Pegawai .....	19
B.2.2 Belanja Barang.....	20
B.2.3 Belanja Modal.....	23
B.2.4 Belanja Sosial.....	23
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .....	32

C.1	Aset Lancar .....	32
C.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran .....	33
C.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan .....	34
C.1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas .....	35
C.1.5	Piutang Bukan Pajak .....	35
C.1.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak .....	36
C.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) .....	36
C.1.8	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran .....	36
C.1.9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	36
C.1.10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	37
C.1.11	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) .....	38
C.1.12	Uang Muka Belanja (Prepayment) .....	38
C.1.13	Persediaan .....	38
C.1.14	Persediaan Badan Layanan Umum .....	39
C.2	Aset Tetap .....	39
C.2.1	Tanah .....	41
C.2.2	Tanah Badan Layanan Umum .....	42
C.2.3	Peralatan dan Mesin .....	42
C.2.4	Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum .....	45
C.2.5	Gedung dan Bangunan .....	45
C.2.6	Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum .....	46
C.2.7	Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	46
C.2.8	Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum .....	47
C.2.9	Aset Tetap Lainnya .....	47
C.2.10	Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum .....	47
C.2.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	47
C.2.12	Akumulasi Penyusutan .....	48
C.3	Piutang Jangka Panjang .....	48
C.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran .....	48
C.3.2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran .....	49
C.3.3	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	49

C.3.4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	50
C.4	Aset Lainnya.....	51
C.4.1	Aset Tak Berwujud .....	51
C.4.2	Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum .....	52
C.4.3	Aset Lain-Lain .....	52
C.4.4	Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum .....	53
	KEWAJIBAN.....	53
C.5	Kewajiban Jangka Pendek .....	53
C.5.1	Utang kepada Pihak Ketiga.....	53
C.5.2	Uang Muka dari KPPN.....	54
C.5.3	Pendapatan Yang Ditangguhkan.....	54
C.5.4	Pendapatan Diterima Dimuka .....	55
C.5.5	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	55
	EKUITAS.....	55
C.6	Ekuitas Dana Lancar.....	55
C.6.1	Cadangan Piutang.....	56
C.6.2	Cadangan Persediaan .....	56
C.6.3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek .....	56
C.6.4	Dana Lancar BLU .....	56
C.6.5	Ekuitas Dana Lancar Lainnya .....	56
C.6.6	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima.....	57
C.6.7	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan.....	57
C.7	Ekuitas Dana Investasi .....	57
C.7.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.....	57
C.7.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.....	57
D.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	57
D.1	KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA.....	57
D.2	TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK .....	57
D.3	INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL .....	62
D.4	REKENING PEMERINTAH.....	62
D.5	PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN .....	62

## LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

LAPORAN BARANG PENGGUNA

LAMPIRAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

DAFTAR INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	xi
Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	xiii
Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 4. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN	16
Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBPN untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	17
Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013	17
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013	18
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	19
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013	20
Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	20
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013	20
Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	21
Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013	23
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	23
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir	23
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	24
Tabel 17. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	32
Tabel 18. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	33
Tabel 19. Rincian Peyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013	34
Tabel 22. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	35
Tabel 30. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi	37
Tabel 31. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi	38
Tabel 33. Rincian Persediaan	39
Tabel 35. Rincian Aset Tetap	41
Tabel 36. Akumulasi Penyusutan	48
Tabel 39. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur	49
Tabel 40. Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur	50
Tabel 41. Rincian Aset Lainnya	51
Tabel 43. Kewajiban Jangka Pendek	53
Tabel 44. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	54
Tabel 45. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan	54
Tabel 46. Rincian Ekuitas Dana Lancar	55



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Lampiran 1 : Rekapitulasi Belanja Penunjang Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan Tahun 2013	xx
Lampiran 2 : Daftar Nama Kelompok Pen erima Bansos Tahun Anggaran 2013	xx
Lampiran 3 : Hasil Rekonsiliasi SAU-SAI dengan KPPN setempat	xx
Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Pengeluaran	xx
Lampiran 5 : SSBP terkait penyetoran sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran (UP/TUP)	xx
Lampiran 6 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Penerimaan	xx
Lampiran 7 : SSBP terkait penyetoran Kas Di Bendahara Penerimaan (PNBP)	xx
Lampiran 8 : SSBP terkait penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas (Jasa Giro)	xx
Lampiran 9 : Kartu piutang bukan pajak per debitur	xx
Lampiran 10 : Kartu penyisihan piutang tidak tertagih - piutang PNBP	xx
Lampiran 11 : Kartu piutang - Tagihan Penjualan Angsuran per debitur	xx
Lampiran 12 : Kartu penyisihan piutang tidak tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran	xx
Lampiran 13 : Kartu piutang - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per debitur	xx
Lampiran 14 : Kartu penyisihan piutang tidak tertagih - TP/TGR	xx
Lampiran 15 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan per 31 Desember 2013 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik	xx
Lampiran 16 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan BLU per 31 Desember 2013 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik	xx
Lampiran 17 : Daftar Aset Tanah per 31 Desember 2013	xx
Lampiran 18 : Daftar Aset Tanah BLU per 31 Desember 2013	xx
Lampiran 19 : SKTJM terkait pencatatan TP/TGR	xx

Lampiran 20	:	Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2012	xx
Lampiran 21	:	Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013	xx

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja *untuk* periode yang berakhir 31 Desember 2013 xx

## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan 018.08.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp 43.870.813.596,00 atau mencapai ~% dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah senilai Rp3.307.047.556.887,00 atau mencapai 96,53% dari alokasi anggaran senilai Rp3.426.093.896.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Uraian	31 Desember 2013			31 Desember 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0,00	43.870.813.596,00	~	11.621.699.009,00
Belanja Negara	3.426.093.896.000,00	3.307.047.556.887,00	96,53	3.779.296.357.264,00

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Jumlah Aset adalah senilai Rp341.940.693.384,00 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp139.663.882.024,00, Aset Tetap senilai 151.474.900.410,00, Piutang Jangka Panjang senilai Rp0,00 dan Aset Lainnya senilai Rp50.801.910.590,00.

Jumlah Kewajiban adalah senilai Rp2.171.198.266,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah senilai Rp339.769.495.118,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar senilai Rp137.492.683.758,00 dan Ekuitas Dana Investasi senilai Rp202.276.811.360,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

URAIAN	TANGGALNERACA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	(Rp)	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	139,663,882,024	600,626,947	139,063,255,077	23153.02
Aset Tetap	151,474,900,410	238,162,808,122	(86,687,907,712)	(36.40)
Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Aset Lainnya	50,801,910,950	56,652,894,391	(5,850,983,441)	(10.33)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>341,940,693,384</b>	<b>295,416,329,460</b>	<b>46,524,363,924</b>	<b>15.75</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	2,171,198,266	554,217,673	1,616,980,593	291.76
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>2,171,198,266</b>	<b>554,217,673</b>	<b>1,616,980,593</b>	<b>291.76</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	137,492,683,758	46,409,274	137,446,274,484	296161.23
Ekuitas Dana Investasi	202,276,811,360	294,815,702,513	(92,538,891,153)	(31.39)
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>339,769,495,118</b>	<b>294,862,111,787</b>	<b>44,907,383,331</b>	<b>15.23</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>341,940,693,384</b>	<b>295,416,329,460</b>	<b>46,524,363,924</b>	<b>15.75</b>

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 Desember 2013 DAN 31 Desember 2012**

Uraian	Catatan	31 Desember 2013			31 Desember 2012
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00	43.870.813.596,00	~	11.621.699.009,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0,00</b>	<b>43.870.813.596,00</b>	~	<b>11.621.699.009,00</b>
<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>B.2</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	22.847.431.000,00	19.281.405.238,00	84,39	20.724.369.544,00
2. Belanja Barang	B.2.2	525.048.382.000,00	458.756.878.493,00	84,17	382.991.589.350,00
3. Belanja Modal	B.2.3	10.150.545.000,00	9.695.947.508,00	94,59	54.450.403.470,00
4. Belanja Sosial	B.2.4	2.848.053.738.000,00	2.819.313.325.648,00	98,99	3.321.129.994.900,00
<b>BELANJA TRANSAKSI NON KAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>3.426.096.896.000,00</b>	<b>3.307.047.556.887,00</b>	<b>96,53</b>	<b>3.779.296.357.264,00</b>

Jakarta, Mei 2014  
Direktur Jenderal Prasarana dan  
Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS.DAA  
NIP. 196010241987031001

## II. NERACA

NERACA  
PER 31 Desember 2013 DAN 31 Desember 2012

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
<b>C.1</b>			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	216,621,850	456,619,306
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	1,906,496,494	4,093,121
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	-	0
Jumlah Kas dan Bank		2,123,118,344	460,712,427
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	-	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	-	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	C.1.7	-	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.8	-	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.1.9	71,344,179	2,940,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.1.10	(356,720)	14,700
Jumlah Piutang (Bersih)		70,987,459	2,954,700
Belanja DiBayar Dimuka	C.1.11	-	0
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.1.12	-	0
Persediaan	C.1.13	137,469,776,221	136,989,220
Persediaan Badan Layanan Umum	C.1.14	-	0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>139,663,882,024</b>	<b>600,626,947</b>
<b>Aset Tetap</b>			
<b>C.2</b>			
Tanah	C.2.1	-	2,000,599,283
Tanah Badan Layanan Umum	C.2.2	-	0
Peralatan dan Mesin	C.2.3	181,038,392,179	174,954,910,077
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	C.2.4	-	0
Gedung dan Bangunan	C.2.5	1,049,415,033	1,049,415,033
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	C.2.6	-	0
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.7	55,461,666,419	54,948,746,469
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	C.2.8	-	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.9	2,792,166,260	2,275,106,760
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	C.2.10	-	0
KDP	C.2.11	-	2,934,030,500
Akumulasi Penyusutan	C.2.12	(88,866,739,481)	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>151,474,900,410</b>	<b>238,162,808,122</b>



<b>Piutang Jangka Panjang</b>	<b>C.3</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.1	-	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Penjualan TP/TGR	C.3.2	-	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.3	-	141,615,543
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	-	(141,615,543)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)</b>		-	<b>0</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>C.4</b>		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	32,941,048,243	32,965,664,983
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	C.4.2	-	0
Aset Lain-Lain	C.4.3	42,772,368,936	23,687,229,408
Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	C.4.4	-	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(24,911,506,229)	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>50,801,910,950</b>	<b>56,652,894,391</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>341,940,693,384</b>	<b>295,416,329,460</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.5</b>		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	48,381,430	95,505,246
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	216,621,850	456,619,306
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.5.3	1,906,194,986	2,093,121
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	-	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	-	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>2,171,198,266</b>	<b>554,217,673</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2,171,198,266</b>	<b>554,217,673</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>C.6</b>		
Cadangan Piutang	C.6.1	70,987,459	2,925,300
Cadangan Persediaan	C.6.2	137,469,776,221	136,989,220
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	(48,079,922)	(93,505,246)
Dana Lancar Badan Layanan Umum	C.6.4	-	0
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.5	-	0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.6	-	0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.7	-	0
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>137,492,683,758</b>	<b>46,409,274</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>C.7</b>		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	151,474,900,410	238,162,808,122
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	50,801,910,950	56,652,894,391
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>202,276,811,360</b>	<b>294,815,702,513</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>339,769,495,118</b>	<b>294,862,111,787</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>341,940,693,384</b>	<b>295,416,329,460</b>

Jakarta, Mei 2014  
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian,

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto,MS.DAA  
NIP. 196010241987031001

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

##### A.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana  
Strategis

##### A.2 KEBIJAKAN TEKNIS

*Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian* didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan

tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

#### **A.2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan dan pengelolaan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

### A.2.3. RUH, VISI DAN MISI

#### **Ruh**

Ruh penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia yaitu Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

#### **Visi**

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

#### **Misi**

Untuk mencapai visi diatas, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi :

- a. Mendorong partisipasi stake holder dalam perluasan dan pengelolaan lahan pertanian yang efektif dan berkelanjutan.
- b. Mendorong pemanfaatan air irigasi di lahan pertanian secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- c. Mendorong pengembangan industri alat dan mesin pertanian, dan memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang mandiri.
- d. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan azas 6 (enam) tepat.
- e. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
- f. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

### A.2.4 TUJUAN

Adapun tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan), adalah sebagai berikut :

- 1. Tujuan pengelolaan lahan dan air tahun 2011–2014, adalah :
  - a. Mengembangkan infrastruktur pertanian aspek lahan pada

- kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  - c. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan lahan pertanian abadi.
  - d. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sebagai diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB).
  - e. Mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani agar ada jaminan kepastian hukum, agar dapat meningkatkan akses petani kepada sumber permodalan.
  - f. Melakukan upaya optimasi lahan, konservasi lahan dan konservasi DAS Hulu , rehabilitasi dan reklamasi lahan dalam rangka pendayagunaan lahan terlantar, pencegahan degradasi lahan yang terus berlanjut serta mencegah meluasnya lahan pertanian yang kritis.
  - g. Mewujudkan usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of Rice Intensification).
  - h. Mengembangkan Rumah Kompos dalam rangka pemanfaatan pupuk organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian.
  - i. Mewujudkan pengembangan sumber air irigasi alternatif skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  - j. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pengembangan dan optimalisasi air irigasi baik jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan pedesaan, maupun pengembangan tata air mikro.
  - k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air di 32 propinsi.
  - l. Melakukan upaya konservasi air, peningkatan kualitas air dan pelestarian lingkungan, sertaantisipasi perubahan iklim global.
  - m. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan pengelola air irigasi dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani.
  - n. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga terkait dalam rangka memecahkan permasalahan dalam pengelolaan lahan dan air.



- c. Mengefektifkan peran pengawasan penyediaan, peredaran dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
- d. Menumbuh kembangkan Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan bengkel alsintan
- e. Melakukan penguatan UPJA yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah setempat
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan UPJA yang berorientasi bisnis dan mandiri agar menjadi UPJA Mandiri
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan peningkatan peranan kelembagaan alsintan.

#### **A.2.5 SASARAN YANG INGIN DICAPAI**

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam koordinasi pembangunan pertanian daerah, serta dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sasaran Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian dalam membangun Pertanian di Indonesia yang hendak dicapai adalah :

- 1. Meningkatnya partisipasi stake holder dalam perluasan dan lahan pertanian yang efektif dan berkelanjutan.
- 2. Terwujudnya efisiensi pemanfaatan air irigasi serta fasilitasi air irigasi di tingkat usahatani melalui kelembagaan pengelolaan air irigasi yang berkembang dan maju
- 3. Tersedianya standarisasi dan mutu alsintan yang baik dan berkembangnya UPJA.
- 4. Lancarnya pelayanan, pendaftaran / perijinan pupuk dan pestisida yang dibutuhkan masyarakat serta tersedianya pupuk dan pestisida yang memenuhi kriteria 6 (enam) tepat.
- 5. Terwujud dan berkembangnya sistem pembiayaan pertanian yang fleksibel dan sederhana.

#### **A.2.6 STRATEGI**

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

##### **1) Good Governance**

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta

kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial dan Sekolah Lapang (SL).

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi



teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

- 7) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan *Bankable*, adalah mendorong peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.
- 8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola *risk sharing*.
- 9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
- 10) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.
- 11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- 12) Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja
- 13) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung
- 14) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi di bidang alat dan mesin pertanian.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### **A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan*

##### **(1) Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

##### **(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Aset*

**(3) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### *Piutang Jangka panjang*

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

#### *Aset lainnya*

#### **d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang

memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Kewajiban

#### (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Ekuitas Dana

#### (5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih

#### (6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

0  
1  
2  
3  
4

#### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah

Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP )
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d.40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah senilai Rp. 43.870.813.596,00 atau mencapai ~% dari estimasi

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah



Rp30.083.921.2  
36,00

pendapatan yang ditetapkan senilai Rp0,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

Kode 4 Digit	Uraian 4 digit	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	-	85,450,000	-
4232	Pendapatan Jasa	-	303,084,066	-
4237	Pendapatan luran dan Denda	-	2,343,265,320	-
4239	Pendapatan Lain-lain	-	41,139,014,210	-
		-	-	-
<b>JUMLAH BRUTO</b>		-	<b>43,870,813,596</b>	-
<b>PENGEMBALIAN</b>		-	-	-
<b>JUMLAH NETTO</b>		-	<b>43,870,813,596</b>	-

Realisasi PNBP 31 Desember 2013 mengalami Kenaikan senilai Rp20.759.859.365,00 atau 178,63% dibandingkan 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh :

- a. adanya pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya (pada satker Kantor Pusat sebesar Rp. 85.450.000,00);
- b. pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp. 303.084.066,00 (terdiri dari Satker KP sebesar Rp. 32.953.783,00; Satker DK sebesar Rp. 74.591,00; dan Satker TP sebesar Rp. 270.055.692,00);
- c. pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 2.343.265.320,00 yang antara lain : pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah pada satker Kantor Pusat untuk kegiatan penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa konsultansi audit jaringan irigasi tersier sebesar Rp. 320.793.968,00 an PT. Surveyor Indonesia dan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket E an. PT. Tri Indah Mandiri sebesar Rp. 1.974.019.950,00 ; dari Satker DK sebesar Rp. 46.134.451,00;
- d. pendapatan lain-lain sebesar Rp. 41.139.014.210,00 antara lain terdiri atas :
  - penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL sebesar Rp. 109.684.392,00;
  - penerimaan kembali belanja lainnya TAYL sebesar Rp. 36.627.214.578,00 (antara lain berasal dari satker Kantor Pusat

berupa pengadaan jasa konsultan pemetaan lahan sawah sebanyak 8 (delapan) paket pada satker pusat (633656) atas temuan LHP BPK-RI sebesar Rp.1.059.870.000,- dan Review Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 298.679.800,- an PT. Exsa International, PT. Bhumi Prasaja, PT. Aerovisi Utama, PT. Waindo Specterra, PT. Aria Graha, PT. Karvak Nusa Geomatika, PT, Sarana Primadata, PT. Kapima Rencanatama;

- penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL sebesar Rp. 30.000.000,00
- pendapatan pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara sebesar Rp. 2.524.207.750,00; (antara lain dari Satker KP sebesar Rp. 2.275.474.987,00
- pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp. 41.139.014.210,00 (berasal dari Satker DK sebesar Rp. 5.459.526.946,00 dan dari Satker TP sebesar Rp. 29.291.543.275,00);

Perbandingan realisasi PNBPN 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBPN untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Kode 4 Digit	Uraian	TA 2013 Rp	TA 2012 Rp	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	85.450.000	47.600.000	37.850.000	79.52
4232	Pendapatan Jasa	303.084.066	418.024.127	(114.940.061)	(27.50)
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	2.343.265.320	125.509.302	2.217.756.018	1.767.01
4239	Pendapatan Lain-lain	41.139.014.210	11.030.565.580	30.108.448.630	272.95
		-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>43.870.813.596</b>	<b>11.621.699.009</b>	<b>32.249.114.587</b>	<b>277.49</b>

Realisasi  
Belanja  
Negara  
3.308.459.  
216.939,0  
0

## B.2 Belanja Negara

Realisasi belanja secara netto pada per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp3.307.047.556.887,00 atau sebesar 96,53% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp7.098.081.870,00 Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

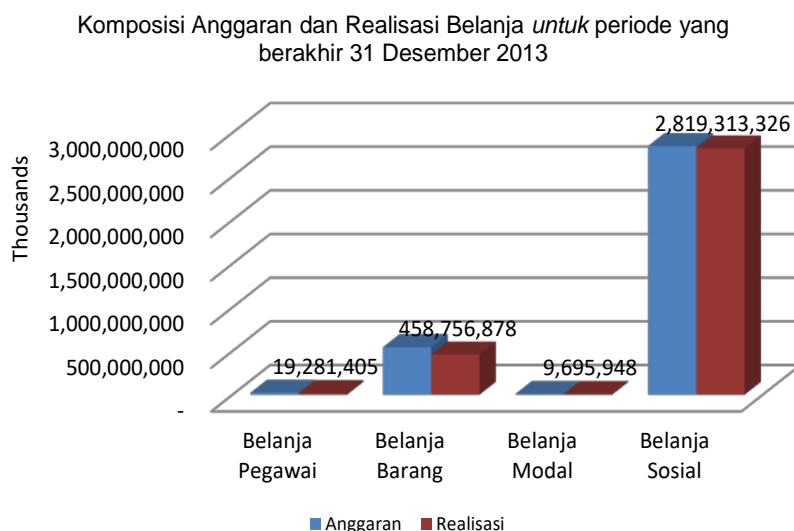
Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian	Realisasi Belanja Netto	(%)
51	BELANJA PEGAWAI	22,847,431,000	19,290,951,647	9,546,409	19,281,405,238	84.3
52	BELANJA BARANG	545,042,182,000	459,251,525,502	494,647,009	458,756,878,493	84.1
53	BELANJA MODAL	10,150,545,000	9,695,947,508	-	9,695,947,508	95.5
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2,848,053,738,000	2,825,907,214,100	6,593,888,452	2,819,313,325,648	98.9
<b>JUMLAH</b>		<b>3,426,093,896,000</b>	<b>3,314,145,638,757</b>	<b>7,098,081,870</b>	<b>3,307,047,556,887</b>	<b>96.5</b>

Realisasi belanja per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian	Realisasi Belanja Netto	(%)
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	755,935,556,280	721,254,893,066	253,825,600	721,001,067,466	95.38
1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1,789,597,398,800	1,765,311,987,090	6,051,186,800	1,759,260,800,290	98.30
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	174,503,800,920	156,172,246,659	495,594,985	155,676,651,674	89.21
3993	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	162,544,600,000	137,522,294,695	62,700,300	137,459,594,395	84.57
3994	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)	395,343,640,000	388,167,717,233	234,774,185	387,932,943,048	98.13
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	148,168,900,000	145,716,500,014	-	145,716,500,014	98.34
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,426,093,896,000</b>	<b>3,314,145,638,757</b>	<b>7,098,081,870</b>	<b>3,307,047,556,887</b>	<b>96.53</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja secara netto setelah dikurangi pengembalian belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 mengalami Penurunan senilai Rp472.248.800.377,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain adanya penghematan pada pagu belanja akun 52 (Akun Belanja Barang) dari pagu anggaran sebesar Rp. 599.134.848.000,00 menjadi sebesar Rp. 545.042.182.000,00 dan akun 573 (Akun Belanja Bantuan Sosial) dari semula pagu anggaran sebesar Rp. 3.141.943.400.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.847.953.738.000,00 untuk penghematan/efisiensi 10%. Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan periode yang sama tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2013	TA 2012	Rp	%
51	Belanja Pegawai	19,281,405,238	20,724,369,544	(1,442,964,306)	(6.96)
52	Belanja Barang	458,756,878,493	382,991,589,350	-	0.00
53	Belanja Modal	9,695,947,508	54,450,403,470	-	0.00
57	Belanja Sosial	2,819,313,325,648	3,321,129,994,900	(501,816,669,252)	(15.11)
<b>JUMLAH</b>		<b>3,307,047,556,887</b>	<b>3,779,296,357,264</b>	<b>(472,248,800,377)</b>	<b>(12.50)</b>

Realisasi  
Belanja  
Pegawai  
19.281.40

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 adalah senilai 19.281.405.238,00 atau sebesar 84,39% dari Pagu

5.238,00

Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai Rp9.546.409,00.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	20.639.657.000	18.720.598.647	90,70
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	1.930.016.000	570.353.000	29,55
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	277.758.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>22.847.431.000</b>	<b>19.290.951.647</b>	<b>84,43</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>9.546.409</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>22.847.431.000</b>	<b>19.281.405.238</b>	<b>84,39</b>

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp19.281.405.238,00 dan 20.724.369.544,00. Penurunan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya belanja uang makan dan honor yang tidak direalisasikan.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18,720,598,647	20,256,536,518	(1,535,937,871)	(7.58)
Belanja Honorarium	-	-	-	-
Belanja Lembur	570,353,000	531,544,000	38,809,000	7.30
Pegawai Transito	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>19,290,951,647</b>	<b>20,788,080,518</b>	<b>(1,497,128,871)</b>	<b>(7.20)</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>9,546,409</b>	<b>63,710,974</b>	<b>(54,164,565)</b>	<b>(85)</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>19,281,405,238</b>	<b>20,724,369,544</b>	<b>(1,442,964,306)</b>	<b>(6.96)</b>

Realisasi  
Belanja  
Barang  
Rp458.75  
7.915.093,  
00

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 adalah senilai Rp458.756.878.493,00 atau sebesar 84,17 dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai Rp494.647.009,00.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub

## Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	51,007,512,000	47,309,740,958	92.75
Belanja Barang Non Operasional	119,056,893,410	83,754,023,451	70.35
Belanja Jasa	74,254,545,420	58,146,256,536	78.31
Belanja Pemeliharaan	3,317,310,000	3,011,396,671	90.78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	154,806,980,330	126,258,892,676	81.56
Belanja Perjalanan Luar Negeri	906,100,000	674,690,568	74.46
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	141,325,400,000	139,742,624,016	98.88
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan utk diserahkan kepada pemda	74,000,000	73,700,000	99.59
Belanja Barang Lainnya Utk diserahkan kepd masyarakat/pemda	293,440,840	280,200,626	
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>545,042,182,000</b>	<b>459,251,525,502</b>	<b>84.26</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>0</b>	<b>494,647,009</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>545,042,182,000</b>	<b>458,756,878,493</b>	<b>84.17</b>

Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan (526) pada periode yang berakhir 31 Desember 2013 senilai Rp140.096.524.642,00 terdiri dari:

- Diserahkan kepada masyarakat/Pemda (5261) senilai Rp139.742.624.016,00
- Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah (5262) senilai Rp73.700.000,00
- Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda (5263) senilai Rp280.200.626,00.

Total nilai persediaan di neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp137.469.776.221,00 terdiri dari:

- Barang konsumsi senilai Rp. 101.346.205,00
- Bahan baku senilai Rp. 1.555.000,00
- Diserahtherimakan kepada masyarakat/Pemda senilai Rp137.366.875.016,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp458.756.878.493,00 dan Rp382.991.589.350,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 19,78%. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	47,309,740,958	33,448,128,773	13,861,612,185	41.44
Belanja Barang Non Operasional	83,754,023,451	103,864,594,154	(20,110,570,703)	(19.36)
Belanja Jasa	58,146,256,536	122,059,304,247	(63,913,047,711)	(52.36)
Belanja Pemeliharaan	3,011,396,671	2,578,309,400	433,087,271	16.80
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	126,258,892,676	121,612,035,505	4,646,857,171	3.82
Belanja Perjalanan Luar Negeri	674,690,568	77,635,245	597,055,323	769.05
<i>Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</i>	139,742,624,016	5,250,000	139,737,374,016	2,661,664.27
<i>Belanja Barang Penunjang DK dan TP utk diserahkan kpd Pemda</i>	73,700,000	106,213,000	(32,513,000)	(30.61)
<i>Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</i>	280,200,626	-	280,200,626	-
			-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>459,251,525,502</b>	<b>383,751,470,324</b>	<b>75,500,055,178</b>	<b>19.67</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>494,647,009</b>	<b>759,880,974</b>	<b>(265,233,965)</b>	<b>(34.90)</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>458,756,878,493</b>	<b>382,991,589,350</b>	<b>75,765,289,143</b>	<b>19.78</b>

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2013 mempunyai Belanja Akun (526) yang dalam proses diserahkan ke masyarakat/pemda terdapat halaman berikut :

Realisasi  
Belanja  
Modal  
Rp9.695.9  
47.508,00

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 adalah senilai Rp9.695.947.508,00 atau sebesar 94,59% dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai 0,00.

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	9.100.545.000	8.564.066.408	94,10
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.150.000.000	1.131.881.100	98,42
BELANJA MODAL LAINNYA	-	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>10.250.545.000</b>	<b>9.695.947.508</b>	<b>94,59</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>10.250.545.000</b>	<b>9.695.947.508</b>	<b>94,59</b>

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp9.695.947.508,00 dan Rp54.450.403.470,00. Penurunan realisasi Belanja modal sebesar 82,19%.

Rincian Belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.564.066.408	18.909.444.470	(10.345.378.062)	(54,71)
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.131.881.100	3.385.709.500	(2.253.828.400)	(66,57)
BELANJA MODAL LAINNYA	-	32.155.249.500	(32.155.249.500)	(100,00)
	-	-	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>9.695.947.508</b>	<b>54.450.403.470</b>	<b>(44.754.455.962)</b>	<b>(82,19)</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>9.695.947.508</b>	<b>54.450.403.470</b>	<b>(44.754.455.962)</b>	<b>(82,19)</b>

Realisasi  
Belanja  
Sosial  
Rp2.820.7  
23.949.10  
0,00

### B.2.4 Belanja Sosial

Realisasi belanja sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 adalah senilai Rp2.819.313.325.648,00 atau sebesar 98,99% dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai Rp. 6.593.888.452,00

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL	-	-	-
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL	420.000.000	420.000.000	100,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.842.183.738.000	2.825.487.214.100	99,41
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL	-	-	-
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>2.842.603.738.000</b>	<b>2.825.907.214.100</b>	<b>99,41</b>
<b>Pengembalian</b>	-	<b>6.593.888.452</b>	-
<b>Jumlah Netto</b>	<b>2.842.603.738.000</b>	<b>2.819.313.325.648</b>	<b>99,18</b>

Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp2.819.313.325.648,00 dan Rp3.321.129.994.900,00. Penurunan realisasi Belanja Sosial sebesar 15,07% antara lain disebabkan karena adanya pengurangan pagu anggaran dengan adanya penghematan anggaran pada belanja akun bansos dari pagu awal sebesar Rp 3.141.943.400.000,00 setelah revisi menjadi Rp. 2.848.053.738.000,00. Rincian Belanja Sosial disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir **31 Desember 2013** dan **31 Desember 2012**

Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL	-	60.000.000	(60.000.000)	(100)
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL	420.000.000	-	420.000.000	-
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.825.487.214.100	3.324.343.207.900	(498.855.993.800)	(15)
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL	-	-	-	-
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL	-	1.125.000.000	(1.125.000.000)	(100)
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>2.825.907.214.100</b>	<b>3.325.528.207.900</b>	<b>(499.620.993.800)</b>	<b>(15)</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>6.593.888.452</b>	<b>4.398.213.000</b>	<b>2.195.675.452</b>	<b>50</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>2.819.313.325.648</b>	<b>3.321.129.994.900</b>	<b>(501.816.669.252)</b>	<b>(15)</b>

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini kegiatan-kegiatan Bansos , yakni:

#### 1. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Pemberian air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menjadi menurun. Apabila kondisi ini dibiarkan terus dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian yang diharapkan, dan berimplikasi negatif terhadap kondisi pendapatan petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi.

Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan.

#### Tujuan

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan penambahan baku lahan
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi .

## Sasaran

1. Terbangunnya jaringan irigasi tingkat usahatani di beberapa propinsi.
2. Meningkatnya luas areal tanam melalui penambahan IP lebih dari lebih dari 30% dan peningkatan produktivitas lebih dari 1 ton/Ha.
3. Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi yang dibangun atau direhabilitasi.

Pagu bansos pengembangan jaringan irigasi sebesar Rp.550.000.000.000,00,- terealisasi Rp. 543.901.908.000,00.

## 2. UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)

Perbaikan kesuburan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan tanah sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian seperti limbah panen (jerami dan lainnya) serta limbah peternakan (kotoran hewan). Perbaikan kesuburan lahan dengan penggunaan pupuk organik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, efisiensi dalam usahatani, peningkatan aspek kesehatan serta terpeliharanya lingkungan hidup.

Proses pembuatan pupuk organik dari bahan baku berupa limbah panen dan limbah peternakan apabila dilakukan secara alami memerlukan waktu cukup lama yaitu sekitar 1 – 2 bulan bahkan lebih. Apabila proses tersebut menggunakan alat bantu berupa APPO (alat pengolah pupuk organik) yang berfungsi sebagai pencacah dan penghancur bahan organik, maka waktu pengomposan menjadi lebih pendek yaitu sekitar hanya 2-3 minggu. Dalam skala kelompok tani/gapoktan, diperlukan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu berupa bangunan rumah kompos untuk penempatan mesin APPO, bak fermentasi, dilengkapi alat pengangkut kendaraan bermotor roda tiga agar lebih efisien, serta hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk organik.

Upaya peningkatan dan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik, dilaksanakan dengan cara pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dari kegiatan tersebut disamping dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mampu membuka lapangan kerja di pedesaan.

## Tujuan

Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO),

yaitu :

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).
2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk.
3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik.
4. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.
5. Meningkatkan populasi ternak.
6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan.
7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan.
8. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

### **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sentra peternakan, sebanyak 100 unit yang tersebar di 93 kabupaten di 26 propinsi.

Pagu bansos Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 79.960.000.000,00,- terealisasi Rp. 79.960.000.000,00,- untuk 490 kelompok tani/gapoktan yang masing masing menerima transfer dana. Sebesar Rp 180.000.000,-/Kelompok Tani utk UPPO dan Rp. 100.000.000,00,-/Kelompok Tani untuk RPPO.

### **3. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

Alat dan mesin pertanian (alsintan) memiliki peranan penting dalam kegiatan usahatani untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, traktor roda 2, pompa air, transplanter yang merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Dalam rangka mempertahankan swasembada beras berkelanjutan, maka pemerintah juga berkomitmen dalam pencapaian surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. Salah satu strategi peningkatan produksi adalah penyempurnaan manajemen teknis yang diantaranya adalah percepatan pengolahan tanah dan penanaman secara serentak.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahal nya harga alsintan, menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsintan oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah kembali menggulirkan program bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 2, traktor roda 4 dan pompa air melalui sumber dana APBN Tahun

Anggaran 2012.

Untuk mendukung pelaksanaan penyediaan ketiga jenis alsintan tersebut di daerah agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menghambat terealisasinya bantuan tersebut, diperlukan pedoman teknis bagi petugas di daerah maupun penerima bantuan. Untuk kegiatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan Mandiri (UPJA Mandiri) telah dilaksanakan di beberapa propinsi yang antara lain adalah Propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Jenis bantuan UPJA Mandiri per Kelompok sebesar Rp. 250.000.000,00 antara lain adalah hand traktor (roda 2), Rice Transplanter, alat bengkel, gudang dan bangunan.

Tujuan

1. Meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani.
2. Meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi.

Sasaran

1. Tercapainya peningkatan kepemilikan alat dan mesin pertanian oleh Poktan/Gapoktan/UPJA untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani melalui pemanfaatan alsintan tersebut.
2. Meningkatnya alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi.

Kegiatan Bantuan Alsin Hadiah bagi UPJA/Kelompok, GP3A, P3A bagi kelompok yang berprestasi diantaranya adalah bantuan alsin antara lain berupa alat mesin pertanian yang berupa hand traktor, hand sprayer.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat dan mesin terdiri atas :

- a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, dari pagu sebesar Rp. 135.425.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 134.546.713.000,00 (99,35%)
- b. Pengembangan UPJA Mandiri, untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang bagi UPJA Mandiri/Kelompok UPJA Mandiri sebesar Rp. 5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 untuk 20 Kelompok UPJA Mandiri tersebar di Propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Bali.
- c. Pagu bansos Tingkat satker Pusat untuk hadiah lomba GP3A dan P3A sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 375.000.000,00 tersebar di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat.

#### **4. PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN**

Jalan pertanian merupakan unsur penting sebagai sarana infrastruktur dalam pengembangan pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Tujuan kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan lahan pertanian.

Sasaran kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah pada sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan).

Pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian dari pagu sebesar Rp. 29.300.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.100.000.000,00 (99,32%)

## 5. PRA/PASCA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN

Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian adalah keadaan atau dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah disertipikatkan, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan surat ukur.

Tujuan kegiatan pasca sertifikasi lahan pertanian adalah untuk mengetahui pemanfaatan sertipikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Sasaran kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian adalah :

- a. Sasaran **Obyek** yaitu lahan pertanian rakyat di sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- b. Sasaran **Subyek** yaitu petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertipikat tanah, melalui program dan kegiatan sertifikasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pagu kegiatan pra/pasca sertifikasi lahan pertanian adalah sebesar Rp. 13.040.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.083.009.000,00 (69,65%).

## 6. PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani (pemilik dan/atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2012 mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.

Tujuan :

- a) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi

wilayah;

- b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
- c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
- d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sasaran :

- a) Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
- b) Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
- c) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Pagu bansos PUAP Rp.330.000.000.000,00. terealisasi Rp. 330.000.000.000,00,- yang disalurkan untuk 3.300 gapoktan.

## 7. OPTIMASI LAHAN

Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan untuk memenuhi kriteria lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dari aspek teknis, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta peningkatan infrastruktur usahatani yang diperlukan.

### Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan adalah:

- a. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan pertanian produktif
- b. meningkatkan indeks pertanaman (IP) untuk memperluas areal tanam.
- c. Mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN)
- d. Melestarikan sumber daya lahan pertanian
- e. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan.

### Sasaran

Sasaran kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk :

- a) Mendukung Subsektor Tanaman Pangan, dengan komoditas khusus padi, pada lahan – lahan yang sementara tidak diusahakan dan IP rendah diprioritaskan pada  $(IP) \leq 100$ .

- b) Mendukung Subsektor Hortikultura  
Lahan kawasan komoditi hortikultura yang belum optimal diutamakan untuk komoditas buah-buahan unggulan nasional dan lokal.
- c) Mendukung Subsektor Perkebunan  
Optimasi lahan perkebunan diarahkan pada lahan kawasan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan nasional dan lokal yang produktivitasnya rendah, jumlah populasi tanaman rendah.
- d) Kawasan Peternakan  
Optimasi lahan peternakan diarahkan pada lahan HMT yang sementara tidak diusahakan.
- e) Sasaran kegiatan optimasi lahan tahun 2013 adalah seluas 253.300 ha, yang terdiri dari kawasan tanaman pangan 227.620 ha, hortikultura 5.880 ha, perkebunan 19.640 ha dan peternakan 160 ha yang tersebar di 32 Propinsi pada 442 Kabupaten/Kota.

Pagu Satker Kantor Pusat kegiatan Pilot Project Pengembangan Optimasi Lahan Responsive Gender sebesar Rp. 140.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 140.000.000,00 dilaksanakan di Tangerang – Banten, Depok – Jawa Barat, Sleman – DI Yogya.

Pagu Pengembangan Optimasi Lahan sebesar Rp. 543.371.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 537.636.680.000,00 (98,94%)

## **8. PENGEMBANGAN SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION)**

merupakan salah satu pendekatan dalam praktek budidaya padi yang menekankan pada manajemen pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan ramah lingkungan.

Dengan pola tanam padi metode SRI diharapkan dapat memberikan tambahan produksi sebanyak 1 s/d 2 ton/Ha , sehingga dapat berkontribusi dalam mensukseskan program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

### **Tujuan**

Tujuan Pengembangan SRI ini adalah :

- a. Memperbaiki kualitas/ kesuburan lahan sawah melalui pemberian asupan bahan organik
- b. Mendukung Pogram Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
- c. Mengefisiensikan penggunaan saprodi dan pemanfaatan air
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang usahatani padi sawah organik metode SRI.
- e. Mengembangkan usahatani padi yang ramah lingkungan.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

### **Sasaran**

Sasaran kegiatan pengembangan SRI adalah petani padi yang tergabung dalam



kelompok tani pada lahan sawah beririgasi ( teknis, setengah teknis dan sederhana) dan lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin. Pada tahun 2013 kegiatan pengembangan SRI seluas 207.000 Ha yang tersebar di 29 propinsi, 277 kabupaten/kota.

Pagu kegiatan Pengembang SRI sebesar Rp. 432.180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 426.958.261.000,00 (98,79%)

## 9. PERLUASAN SAWAH

Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/ baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah.

### Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menambah luas baku lahan tanaman pangan melalui kegiatan perluasan sawah.

### Sasaran

Sasaran areal perluasan sawah tahun 2010 – 2014 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 374.125 Ha. Sedangkan sasaran perluasan sawah TA. 2013 yang dibiayai dari APBN direncanakan seluas 65.000 Ha.

Pagu kegiatan perluasan sawah sebesar Rp. 623.070.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 617.434.183.000,00 (99,10%)

Daftar rincian bansos per kegiatan dan penerimanya disajikan pada <Lampiran 2>.

Atas Pendapatan dan Belanja yang tersaji dalam LRA telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi tersaji pada <Lampiran 3>.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp139.595.819.865,00 dan Rp600.626.947,00.

Aset Lancar merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kantor per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Rincian Aset Lancar per **31 Desember 2013** dan **31 Desember 2012**

No	Aset Lancar	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	216.621.850	456.619.306
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.906.496.494	4.093.121
4	Kas pada Badan Layanan Umum	-	-
5	Piutang Bukan Pajak	-	-
6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	-	-
8	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	71.344.179	2.940.000
10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	(356.720)	(14.700)
11	Belanja DiBayar Dimuka	-	-
12	Uang Muka Belanja (Prepayment)	-	-
13	Persediaan	137.469.776.221	136.989.220
14	Persediaan Badan Layanan Umum	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>139.663.882.024</b>	<b>600.626.947</b>

Kas di  
Bendahar  
a  
Pengeluar  
an  
Rp216.62  
1.850,00

### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp216.621.850,00 dan Rp456.619.306,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca (31 Desember 2013), namun telah disetorkan pada bulan Januari 2014 sesuai dengan setoran SSBP terlampir.. Jumlah tersebut terdiri dari :

**Tabel 18. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012**

No	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Disnak Prop Jatim	Rp -	Rp 64.256.900
2	Disbun Prop. Sumut	Rp -	Rp (61.000)
3	Distannak Prop. Sulut	Rp 7.352.000	Rp 68.076.000
4	Distanbunnak KP Kab. Kep. Talaud	Rp -	Rp 5.000.000
5	Distan Daerah Prop. Sulteng	Rp -	Rp 36.545.000
6	Dishutbun Kab. Morowali	Rp -	Rp 600.000
7	Distan Prop. Sultra	Rp -	Rp 5.714.000
8	Distan Kab. Muna	Rp -	Rp 50.000.000
9	Distan KP. Konawe Utara	Rp -	Rp 7.600.000
10	Disbun Prop. NTB	Rp -	Rp 1.120.000
11	Disnak Prop. NTT	Rp 7.000.000	Rp 10.004.000
12	Distanbun Prop. NTT	Rp 133.345.100	Rp 201.268.650
13	Distanbunnak Kep. Bangka Belitung	Rp -	Rp 5.895.756
14	Distanunhutkan Kab. Tambraw	Rp -	Rp 600.000
15	Disnakkeswan Prop. Kalbar	Rp 1.500.000	Rp -
16	Disnakkeswan Prop. Sulteng	Rp 13.779.000	Rp -
17	Distannak Kab. Alor	Rp 2.527.750	Rp -
18	Distanbunnak Prop. Kep. Babel	Rp 41.118.000	Rp -
19	Distannak KP Prop. Pabar	Rp 10.000.000	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 216.621.850</b>	<b>Rp 456.619.306</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke rekening Kas Negara senilai **Rp216.621.850,00** sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 19. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran per **31 Desember 2013**

No.	Tanggal/Bulan/ Tahun	Nomor NTB	Nomor NTPN	Akun	Jumlah
1.	08-01-2014	140108004616	1500100302070511	815111	1.500.000
2.	08-01-2014	95162-000348	0610020307040606	815114	4.980.000
3.	08-01-2014	95162-000348	1000101103010409	815114	2.372.000
4.	16-01-2014	94111.000625	1003051400010204	815114	1.980.000
5.	16-01-2014	94111.000624	0812040315010215	815114	11.799.000
6.	09-01-2014	925918517	0601060013061500	815114	7.000.000
7.	07-01-2014	39815434073	1101130912140809	815114	130.120.000
8.	07-01-2014	39815434073	1307050703060104	815114	3.225.100
9.	07-01-2014	39815769174	0211101014030308	815114	2.527.750
10.	06-01-2014	85800-14000	0214031202090303	815114	10.608.000
11.	06-01-2014	-	0907115012019810	815114	30.155.000
12.	02-01-2014	-	0405090713020312	815114	355.000
13	08-01-2014	-	1513151011020103	815114	10.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>216.621.850</b>

Rincian bukti setor tersaji pada <Lampiran 4>.

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan

### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2013 dan

n Rp0,00

31 Desember 2012 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas  
Lainnya  
dan  
Setara  
Kas  
Rp1.906.4  
96.494,00

### C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp1.906.496.494,00 dan Rp4.093.121,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 terdiri dari : **Tabel 20. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas**

No.	Keterangan	31 Desember 2013	2012
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp 1.906.196.494	Rp 2.093.121
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	Rp -	Rp -
3	Honor kegiatan yang belum dibagikan	Rp -	Rp -
4	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	Rp 300.000	Rp 2.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.906.496.494</b>	<b>Rp 4.093.121</b>

Untuk pengembalian belanja yang belum disetor ke kas Negara sebesar Rp.300.000,00 telah dikembalikan pada bulan Januari 2014

Piutang  
Bukan  
Pajak 0,00

### C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai 0,00 dan 0,00 yang merupakan semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Penyisihan  
Piutang  
Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Bukan  
Pajak 0,00

#### C.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai 0,00 dan 0,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

BL TPA  
Rp0,00

#### C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Penyisihan  
Piutang  
Tak  
Tertagih –  
Bag.  
Lancar  
TPA  
Rp0,00

#### C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

BL TGR  
Rp2.940.0  
00,00

#### C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp71.344.179,00 dan Rp2.940.000,00 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi

No.	Debitur	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Satker Pusat Ditjen PSP	Rp9.340.000,00	Rp2.940.000,00
2	Distan TPH Prop. Aceh	Rp12.450.000,00	
3	Distannak Prop. Kalteng	Rp40.400.000,00	
4	Distannak Prop. Sulut	Rp3.790.000,00	
5	Distan TPH Prop. Sulsel	Rp5.364.179,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp71.344.179,00</b>	<b>Rp2.940.000,00</b>

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>2.940.000</b>
Mutasi tambah:	
- TGR mutasi tambah	68.404.179
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>68.404.179</b>
Mutasi kurang:	
- TGR Mutasi Kurang	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>71.344.179</b>

Penyisihan  
Piutang  
Tak  
Tertagih –  
Bag.  
Lancar  
TP/TGR  
Rp-  
14.700,00

#### C.1.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp-356.720,00 dan Rp-14.700,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

Tabel 22. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang (setelah dikurangi agunan)	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Satker Ditjen PSP	Lancar	9.340.000	0,05%	(46.700)
Distan TPH Prop. Aceh	Lancar	12.450.000	0,05%	(62.250)
Distannak Prop. Kalteng	Lancar	40.400.000	0,05%	(202.000)
Distannak Prop. Sulut	Lancar	3.790.000	0,05%	(18.950)
Distan TPH Prop. Sulsel	Lancar	5.364.179	0,05%	(26.821)
<b>Total</b>		<b>71.344.179</b>		<b>(356.721)</b>

Belanja  
Dibayar  
Dimuka  
(Prepaid)  
Rp0,00

#### C.1.11 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Belanja Dibayar Di muka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Uang  
Muka  
Belanja  
(Prepayment)  
Rp0,00

#### C.1.12 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka Belanja merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan kepada pihak ketiga dari total pembayaran.

#### C.1.13 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah senilai Rp137.469.776.221,00 dan Rp136.989.220,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada neraca per 31 Desember 2013 berdasarkan hasil stock opname yang tersaji pada <lampiran 15>.

Persediaan  
n  
Rp137.46  
9.776.221,  
00

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Barang konsumsi	101.346.205	120.265.220
2	suku cadang	393.270.000	-
3	Pita,cukai,materai,leges	-	111.000
4	Hewan,tanaman utk dijual/diserahkn	110.250.000	-
5	Peralatan dan mesin utk dijual/diserahkan	134.038.113.266	-
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	11.363.000
7	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	269.843.750	5.250.000
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2.204.085.500	-
9	Bahan baku	1.555.000	-
8	Persediaan lainnya	351.312.500	-
<b>Jumlah</b>		<b>137.469.776.221</b>	<b>136.989.220</b>

Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Persediaan  
n Badan  
Layanan  
Umum  
Rp0,00

#### C.1.14 Persediaan Badan Layanan Umum

Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

#### C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah senilai 151.474.900.410,00 dan 238.162.808.122,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :





Tabel 24. Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Selisih
1	Tanah	-	2,000,599,283	(2,000,599,283)
2	Tanah BLU	-	-	0
3	Peralatan dan Mesin	181,038,392,179	174,954,910,077	6,083,482,102
4	Peralatan dan Mesin BLU	-	-	0
5	Gedung dan Bangunan	1,049,415,033	1,049,415,033	0
6	Gedung dan Bangunan BLU	-	-	0
7	Jalan Irigasi dan Jaringan	55,461,666,419	54,948,746,469	512,919,950
8	Jalan Irigasi dan Jaringan BLU	-	-	0
9	Aset Tetap Lainnya	2,792,166,260	2,275,106,760	517,059,500
10	Aset Tetap Lainnya BLU	-	-	0
11	KDP	-	2,934,030,500	(2,934,030,500)
<b>Jumlah</b>		<b>240,341,639,891</b>	<b>238,162,808,122</b>	<b>2,178,831,769</b>
Akum. Penyusutan		(88,866,739,481)	0	(88,866,739,481)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>151,474,900,410</b>	<b>238,162,808,122</b>	<b>(86,687,907,712)</b>

Tanah  
Rp2.000.5  
99.283,00

### C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp2.000.599.283,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.330.004 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 2.000.599.283,00 dan mutasi tambah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp.0 dan mutasi kurang seluas 1.330.004 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp.2.000.599.283,00

Aset Tanah tersebut pada kenyataannya diperoleh dari hasil pembiayaan kegiatan cetak sawah / perluasan Areal Pertanian/sewa tanah untuk kebon pembibitan, bukan hasil pembelian tanah dimana keberadaan aset tersebut ada di masyarakat atau kelompok tani yang secara fisik tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah dalam hal ini Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Tahun 2011 hasil temuan BPK untuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda ada lebih saji aset berupa tanah sebesar 138.888.000 yang diperoleh dari hasil pembiayaan dari kegiatan cetak sawah. Hasil dari Audited BPK dikoreksi pencatatan untuk Dishut Bun Kab. Nunukan sebesar Rp. 143.815.700,00, sedangkan untuk aset tanah lainnya masuk henti guna akan diproses di semester I masih menunggu hasil KPKNL setempat.

Tanah  
Badan  
Layanan  
Umum  
Rp0,00

### C.2.2 Tanah Badan Layanan Umum

Saldo aset tetap berupa tanah Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Peralatan  
dan Mesin  
Rp184.34  
4.566.645,  
00

### C.2.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp181.038.392.179,00 dan Rp174.954.910.077,00.

Mutasi nilai aset peralatan dan mesin per tanggal pelaporan tercantum dalam laporan CaLBM, terlampir. adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>174.954.910.077</b>
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	12.543.717.112
- Uraian mutasi tambah 2	0
- dst	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>12.543.717.112</b>
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	(3.154.060.544)
- Mutasi Kurang 2	(3.306.174.466)
- dst	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(6.460.235.010)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>181.038.392.179</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>(80.607.109.753)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>100.431.282.426</b>

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin senilai Rp12.543.717.112,00 berasal dari:

- Mutasi jumlah barang alat besar 14 unit dengan nilai sebesar Rp. 180.863.585,00 terdiri atas pembelian sebesar Rp. 47.875.000,00; transfer masuk sebesar Rp. 101.200.000,00.; hibah masuk sebesar Rp. 29.771.918,00 dan transaksi normalisasi BMN Aset Tetap sebesar Rp. 2.016.667,00
- Mutasi tambah jumlah barang alat angkutan 26 unit sebesar Rp.

- 1.583.433.485,00 terdiri atas : penambahan saldo awal sebesar Rp. 5.230.838,00; pembelian sebesar Rp. 1.399.680.000,00; transfer masuk sebesar Rp. 121.100.128,00; hibah masuk sebesar Rp. 45.171.186,00 dan transaksi normalisasi BMN asset tetap sebesar Rp. 12.251.333,00
- Mutasi tambah alat bengkel 1 unit sebesar Rp. 10.000.000,00 terdiri atas transfer masuk sebesar Rp. 10.000.000,00
  - Mutasi tambah alat pertanian 4,984 unit sebesar Rp. 2.017.427.502,00 terdiri atas : pembelian sebesar Rp. 149.700.000,00. Transfer masuk sebesar Rp. 1.036.220.000,00; Hibah Masuk sebesar Rp. 831.507.502,00
  - Mutasi tambah alat kantor dan rumah tangga 642 unit sebesar Rp. 4.326.750.608,00 terdiri atas : penambahan saldo awal sebesar Rp. 30.435.000,00; Pembelian sebesar Rp. 3.775.596.608,00; Transfer masuk sebesar Rp. 327.657.000,00; Reklasifikasi masuk sebesar Rp. 32.675.000,00; Pengembangan nilai asset sebesar Rp. 160.387.000,00
  - Mutasi tambah Alat studio, komunikasi dan pemancar 81 unit sebesar Rp. 386.077.300,00 terdiri atas: penambahan saldo awal sebesar Rp. 1.965.000,00; Pembelian sebesar Rp. 368.412.300,00; Transfer masuk sebesar Rp. 13.000.000,00; Reklasifikasi masuk sebesar Rp. 2.700.000,00
  - Mutasi tambah alat kedokteran dan kesehatan 4 unit sebesar Rp. 300.000,00 terdiri atas transfer masuk
  - Mutasi tambah alat laboratorium 16 unit sebesar Rp. 668.910.132,00 terdiri atas : pembelian sebesar Rp. 2.000.000,00; Transfer masuk sebesar Rp. 169.000.000,00; Hibah masuk sebesar Rp. 497.910.132,00
  - Mutasi tambah alat persenjataan 34 unit sebesar Rp. 158.352.700,00 terdiri atas : pembelian sebesar Rp. 152.352.700,00; Reklasifikasi masuk sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Mutasi tambah alat komputer 446 unit sebesar Rp. 3.262.175.800,00 terdiri atas : penambahan saldo awal sebesar Rp. 30.440.000,00; Pembelian sebesar Rp. 2.792.620.800,00; Transfer masuk sebesar Rp. 360.250.000,00; Reklasifikasi masuk sebesar Rp. 24.300.000,00; Perolehan lainnya sebesar Rp. 48.865.000,00;

*Pengembangan nilai asset sebesar Rp. 5.700.000,00*

- *Mutasi tambah Alat Keselamatan kerja 4 unit sebesar Rp. 7.800.000,00 didapat dari pembelian.*

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin senilai Rp6.640.235.010,00 berasal dari:

- *Mutasi kurang jumlah barang alat besar 8 unit sebesar Rp. 183.671.918,00 terdiri atas : transfer keluar sebesar Rp. Rp.5.500.000,00; Hibah Keluar sebesar Rp.148.400.000,00 dan Koreksi Pencatatan BPK sebesar Rp. 29.771.918,00*
- *Mutasi kurang alat angkutan 21 unit sebesar Rp. 572.634.024,00 terdiri atas : transaksi normalisasi BMN Aset tetap sebesar Rp. 6.852.000,00; transfet keluar sebesar Rp. 242.374.000,00; hibah keluar sebesar Rp. 75.076.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp.45.171.186,00 dan penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp.203.160.838,00*
- *Mutasi kurang jumlah barang alat bengkel 10 unit sebesar Rp. 255.804.167,00 terdiri atas : hibah keluar sebesar Rp. 32.943.500,00 dan penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp.222.534.000,00*
- *Mutasi kurang alat pertanian 4.889 unit sebesar Rp.1.738.833.502 ,00 terdiri atas : transfer keluar sebesar Rp. 846.170.000,00; Hibah keluar sebesar Rp. 61.156.000,000*
- *Mutasi kurang alat rumah tangga 240 unit sebesar Rp. 570.502.299,00 terdiri atas : Penghapusan sebesar Rp. 161.770.999,00; Transfer keluar sebesar Rp. 281.235.000,00; Hibah keluar sebesar Rp. 117.871.300,00; Reklasifikasi keluar sebesar Rp. 9.625.000,00;*
- *Mutasi kurang alat studio, komunikasi dan pemancar 28 unit sebesar Rp. 70.089.930,00 terdiri atas : Penghapusan sebesar Rp. 7.581.000,00; Transfer keluar sebesar Rp. 1.735.484,00; Hibah keluar sebesar Rp. 58.583.446,00; Penghentian asset dari penggunaan sebesar Rp. 2.190.000,00*
- *Mutasi kurang Alat kedokteran dan kesehatan 10 unit sebesar Rp. 8.250.000,00 terdiri atas reklasifikasi keluar.*
- *Mutasi kurang alat laboratorium 24 unit sebesar Rp. 209.166.000,00*

terdiri atas : transfer keluar sebesar Rp. 165.000.000,00; Hibah keluar sebesar Rp. 21.666.000,00; Reklasifikasi keluar sebesar Rp. 22.500.000,00

- Mutasi kurang alat komputer 91 unit sebesar 966.006.976,00 terdiri atas : transaksi normalisasi BMN Aset tetap sebesar Rp. 59.202.340,00; Penghapusan sebesar Rp. 88.084.545,00; Transfer keluar sebesar Rp. 97.300.000,00; Hibah keluar sebesar Rp. 630.700.091,00; Reklasifikasi keluar sebesar Rp. 2.100.000,00; Koreksi pencatatan sebesar Rp. 44.400.000,00; Penghentian asset dari penggunaan sebesar Rp. 44.220.000,00

Peralatan  
dan Mesin  
Badan  
Layanan  
Umum  
Rp0,00

#### C.2.4 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLU per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp0,00

Gedung  
dan  
Bangunan  
Rp1.049.4  
15.033,00

#### C.2.5 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp1.049.415.033,00 dan Rp Rp1.049.415.033,00. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp1.131.881.100,00 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan.

Mutasi nilai aset Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>1,049,415,033</b>
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	0
- Uraian mutasi tambah 2	0
- dst	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	0
- Mutasi Kurang 2	0
- dst	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>1,049,415,033</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>(64,366,625)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>985,048,408</b>

Gedung  
dan  
Bangunan  
BLU  
Rp0,00

### C.2.6 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum

Nilai gedung dan bangunan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp0,00 dan Rp Rp0,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLU per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp0,00.

Jalan,  
Irigasi dan  
Jaringan  
Rp61.023.  
231.919,0  
0

### C.2.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp55.461.666.419,00 dan Rp Rp54.948.746.469,00. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp0,00 yang merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Mutasi nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>54,948,746,469</b>
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	9,992,761,650
- Uraian mutasi tambah 2	0
- dst	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>9,992,761,650</b>
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	(3,918,276,200)
- Mutasi Kurang 2	(5,561,565,500)
- dst	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(9,479,841,700)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>55,461,666,419</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>(8,184,163,103)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>47,277,503,316</b>

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp.9.992.761.650,00 berasal dari:

- Mutasi tambahan jalan dan jembatan sebesar Rp. 566.357.000,00
- Mutasi tambah irigasi sebesar Rp. 9.321.904.650,00
- Mutasi tambah jaringan sebesar Rp. 104.500.000,00

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp.3.918.276.200,00 berasal dari:

- Mutasi kurang irigasi sebesar Rp. 8.388.972.426,00

- Mutasi kurang jaringan sebesar Rp. 533.609.274,00

Jalan,  
Irigasi dan  
Jaringan  
BLU  
Rp61.023.  
231.919,0  
0

### C.2.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum

Nilai jalan, irigasi dan jaringan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp0,00 dan Rp Rp0,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BLU per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp0,00.

Aset  
Tetap  
Lainnya  
Rp2.240.1  
31.760,00

### C.2.9 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp2.792.166.260,00 dan Rp2.275.106.760,00. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset aset tetap lainnya per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp0,00 yang merupakan belanja modal lainnya.

Mutasi nilai aset Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>2,275,106,760</b>
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	1,639,300,000
- Uraian mutasi tambah 2	552,034,500
- dst	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>2,191,334,500</b>
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	(1,674,275,000)
- Mutasi Kurang 2	0
- dst	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(1,674,275,000)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>2,792,166,260</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>(9,100,000)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>2,783,066,260</b>

Aset  
Tetap  
Lainnya  
BLU  
Rp0,00

### C.2.10 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum

Nilai aset tetap lainnya badan layanan umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset aset tetap lainnya BLU per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp0,00 yang merupakan belanja modal lainnya BLU

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaa  
n  
Rp552.03

### C.2.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan



4.500,00

Rp2.934.030.500,00

Pada Semester I tahun 2013 telah dilakukan transfer keluar ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai BAST nomor 76/TU.210/B.1.2/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 senilai Rp. 2.934.030.500,00. Sedangkan pada Semester II tahun 2013 ada transfer keluar ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 06 Juni 2013 dengan BAST Nomor 811/PL.140/B.1/06/2013 senilai Rp. 281.788.600,00

### C.2.12 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp-92.324.579.458,00 dan Rp Rp0,00 merupakan penjumlahan akumulasi penyusutan dari masing-masing Akun pada pos Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Akumulasi Penyusutan

per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Selisih
1	Peralatan dan Mesin	(80,607,109,753)	-	(80,607,109,753)
2	Peralatan dan Mesin BLU	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	(64,366,625)	-	(64,366,625)
4	Gedung dan Bangunan BLU	-	-	-
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	(8,186,163,103)	-	(8,186,163,103)
6	Jalan Irigasi dan Jaringan BLU	-	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	(9,100,000)	-	(9,100,000)
8	Aset Tetap Lainnya BLU	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(88,866,739,481)</b>	<b>-</b>	<b>(88,866,739,481)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 33, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada <Lampiran 13> pada Laporan Keuangan ini.

## C.3 Piutang Jangka Panjang

### C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0,00

merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang tak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00

### C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 , yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

Tuntutan Perbendaharaan Rp71.344.179,00

### C.3.3 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp71.344.179,00 dan Rp141.615.543,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Daftar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per debitur sesuai dengan kartu piutang yang tersaji pada <Lampiran 13>.

Rekapitulasi Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur

No.	Nama	Jumlah
1	Satker Pusat Ditjen PSP	Rp 9,340,000.00
2	Distan TPH Prop. Aceh	Rp 12,450,000.00
3	Distannak Prop. Kalteng	Rp 40,400,000.00
4	Distannak Prop. Sulut	Rp 3,790,000.00
5	Distan TPH Prop. Sulsel	Rp 5,364,179.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 71,344,179.00</b>

Berdasarkan tabel di atas, nilai TP/TGR yang tercatat merupakan TP/TGR yang telah didasarkan dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sesuai dengan <Lampiran 19>.

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>141,615,543</b>
Mutasi tambah:	
- TGR mutasi tambah	62,004,179
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>62,004,179</b>
Mutasi kurang:	
- TGR Mutasi Kurang	132,275,543
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>132,275,543</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>71,344,179</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah senilai Rp.62.004.179,00 berasal dari:

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Aceh sebesar Rp. 12.450.000,00; Dinas Pertanian dan Peternakan Prop. Kalimantan Tengah sebesar Rp. 40.400.000,00; Dinas Pertanian dan Peternakan Prop. Sulawesi Utara sebesar Rp. 3.790.000,00; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Sulawesi Selatan sebesar Rp. 5.364.179,00

Mutasi kurang senilai Rp132.275.543,00 berasal dari:

- Reklasifikasi TGR Pusat sebesar Rp. 2.940.000,00; Pelunasan TGR sebesar Rp. 128.335.543,00 (Distannak Kab. Bolaang Mongondow, Distan TP Kab. Subang, Distan Kab.Maluku Tengah; Distan Kab. Muna) dan Pelunasan TGR Satker Pusat Ditjen PSP sebesar Rp. 1.000.000,00

Penyisihan  
Piutang  
tak  
Tertagih -  
Tuntutan  
Perbenda-  
haraan  
Rp-  
71.344.17  
9,00

#### C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing senilai Rp-71.344.179,00 dan Rp-141.615.543,00, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

Tabel 27. Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang (setelah dikurangi agunan)	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Satker Pusat	Macet	9.340.000	100,00%	9.340.000
Distan TPH Prop. Aceh	Macet	12.450.000	100,00%	12.450.000
Distannak Prop. Kalteng	Macet	40.400.000	100,00%	40.400.000
Distannak Prop. Sulut	Macet	3.790.000	100,00%	3.790.000
Distan TPH Prop. Sulsel	Macet	5.364.170	100,00%	5.364.170
<b>Total</b>				<b>71.344.170</b>

Daftar penyisihan piutang tidak tertagih - TP/TGR sesuai dengan kartu penyisihan piutang tidak tertagih - TP/TGR yang tersaji pada <Lamp14>.

Aset  
Lainnya  
Rp47.064.  
356.086,0  
0

#### C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp50.801.910.950,00 dan Rp56.652.894.391,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 28. Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Aset Tak Berwujud	Rp 32,941,048,243.00	Rp 32,965,664,983.00
2	Aset Lain-Lain	Rp 42,772,368,936.00	Rp 23,687,229,408.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 75,713,417,179.00</b>	<b>Rp 56,652,894,391.00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp (24,911,506,229.00)</b>	<b>Rp -</b>
<b>Nilai Buku Aset Lainnya</b>		<b>Rp 50,801,910,950.00</b>	<b>Rp 56,652,894,391.00</b>

##### C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp32.941.048.243,00 dan Rp32.965.664.983,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB dapat dilihat dalam laporan CaLBMN

Mutasi nilai aset tak berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>32.965.664.983</b>
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	1.980.000
- Uraian mutasi tambah 2	0
- dst	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.980.000</b>
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	15.514.765
- Mutasi Kurang 2	11.081.975
- dst	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>26.596.740</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>32.941.048.243</b>

#### C.4.2 Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

#### C.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp42.772.368.936,00 dan Rp23.687.229.408,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional , namun belum diusulkan proses penghapusan dari BMN ke Pengelola Barang. Dalam hal ini terdapat penambahan Aset lain-lain sebesar Rp. 13.924.665.050,- yang merupakan pelimpahan dana SP3 hasil serah terima dari Sekretariat Jenderal Kementan kepada Ditjen PSP sebesar Rp.108.766.026.516,00 periode 31 Desember 2012. Sedangkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi dengan ke 5 Bank Penjaminan periode 31 Desember 2013 sebesar Rp.15.830.840.346,96 dengan rincian asset lain-lain sebesar Rp. 13.924.665.050,00 dan kas lainnya dan setara kas sebesar Rp. 1.906.175.296,96.

Mutasi nilai aset Lain-lain per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>23.687.229.408</b>
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	13.924.665.050
- Uraian mutasi tambah 2	3.149.619.574
- dst	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>17.074.284.624</b>
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	23.697.485.029
- Mutasi Kurang 2	2.000.599.283
- dst	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>25.698.084.312</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>27.698.683.595</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>42.772.368.936</b>

#### C.4.4 Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum

Saldo Aset Lain Lain Badan Layanan Umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

### KEWAJIBAN

#### C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji senilai Rp2.171.198.266,00 dan Rp554.217.673,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

rincian Kewajiban Jangka Pendek pada kantor per 31 Desember 2013 disajikan pada table berikut:

**Tabel 29. Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Kewajiban	Jumlah
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	48,381,119
2	Uang Muka dari KPPN	216,621,850
3	Pendapatan Yang Ditangguhkan	1,906,195,297
4	Pendapatan Diterima Dimuka	-
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
<b>Jumlah</b>		<b>2,171,198,266</b>

#### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp48.381.430,00 dan Rp95.505.246,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak

ketiga lainnya. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Dalam hal ini adalah pembayaran langganan PT. PLN dan PT. Telkom bulan Desember 2013..

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

**Tabel 30. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Kekurangan pembayaran gaji pegawai
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 48,381,430.00	Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum dibayar
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp -	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
4	dsb..		
<b>Total</b>		<b>Rp 48,381,430.00</b>	

#### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp216.621.850,00 dan Rp456.619.306,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

#### C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari Kas Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai adalah Rp1.906.496.494,00 dan Rp2.093.121,00 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

**Tabel 31. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan**

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2013
1	<i>Pendapatan Jasa Giro</i>	Rp 1.906.196.494
2	<i>Pengembalian Belanja</i>	Rp 300.000
3	<i>Pungutan/Potongan Pajak yang belum disetor</i>	Rp -
4	<i>&lt;dst&gt;</i>	Rp -
<b>Total</b>		<b>Rp 1.906.496.494</b>

Pendapatan yang ditangguhkan senilai Rp1.906.496.494,00 merupakan akun yang terdiri dari akun :

1. Kas dibendahara Penerimaan senilai Rp0,00 yaitu diantaranya

berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas Negara/penerimaan PNBPN yang belum disetor.

2. Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp1.906.496.494,00 diantaranya berasal dari jasa giro yang belum disetor, belanja perjalanan dinas yang belum disetor, pajak yang belum disetor dan PNBPN.

#### **C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka**

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Saldo per 31 Desember 2013 senilai Rp0,00

#### **C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya yang harus segera diselesaikan. Saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 .

### **EKUITAS**

#### **C.6 Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada table berikut:

Tabel 32. Rincian Ekuitas Dana Lancar



No	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Cadangan Piutang	2,925,300	2,925,300
2	Cadangan Persediaan	137,469,776,221	136,989,220
3	Dana Yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka pendek	(48,079,922)	(93,505,246)
4	Dana Lancar BLU	-	-
5	Ekuitas Dana lancar Lainnya	-	-
6	Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima	-	-
7	Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>137,424,621,599</b>	<b>46,409,274</b>

#### C.6.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp70.987.459,00 dan Rp2.925.300,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

#### C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp137.469.776.221,00 dan Rp136.989.220,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

#### C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar minus Rp-48.079.922,00 dan minus Rp-93.505.246,00. Akun tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

#### C.6.4 Dana Lancar BLU

Jumlah Dana Lancar BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Akun tersebut merupakan akun penyeimbang akun Kas pada Badan Layanan Umum.

#### C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Akun

tersebut merupakan penyeimbang dari akun Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.

#### **C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima**

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

#### **C.6.7 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan**

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp0,00 dan minus Rp0,00. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

### **C.7 Ekuitas Dana Investasi**

#### **C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah senilai Rp151.474.900.410,00 dan Rp238.162.808.122,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

#### **C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing senilai Rp50.801.910.950,00 dan Rp56.652.894.391,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

D.2.1 Dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) yang pada awalnya adalah merupakan kegiatan pada Satker Pusat Pembiayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi pada Kementerian Pertanian, Pusat Pembiayaan pindah menjadi Direktorat Pembiayaan Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.

Perkembangan dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Alokasi dan SP3 kepada lima bank pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian dan pencairan melalui KPPN V pada tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Pengalokasian Dana SP3 kepada Lima Bank Pelaksana

No.	Bank Pelaksana	Keputusan Menteri Pertanian	Jumlah Alokasi (Rp)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	471/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006	100.000.000.000,00
2	PT BSM	472/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006	85.000.000.000,00
3	PT Bank Bukopin (Persero) Tbk	473/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006	40.000.000.000,00
4	PT BPD NTB	474/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006	15.000.000.000,00
5	PT BPD Jawa Timur	475/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006	15.000.000.000,00
	Jumlah		255.000.000.000,00

- b. Dari penempatan dana SP3 sebesar 255 miliar, sampai dengan tahun 2008 telah ditransfer ke rekening penampungan (lima rekening di Bank Pelaksana) sebagai dana tidak terikat sebesar Rp. 88.414.341.985,05 dan masih dalam status dana penjaminan kredit SP3 (terikat) pada lima rekening bankpelaksana sebesar Rp. 166.585.658.014,95. Seluruh dana yang statusnya tidak terikat telah disetorkan ke rekening BUN No. 502.000000 dan rekening penampungan ditutup dan dinyatakan tidak aktif, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 Perkembangan dana SP3 sampai dengan Tahun 2008

No.	Bank Pelaksana	Dana Tidak Terikat (Rp)	Dana Terikat	Jumlah Alokasi (Rp)
1	PT Bank Mandiri	28,931,068,402.18	11,068,931,597.82	40,000,000,000.00
2	PT BSM	<b>22,349,897,187.73</b>	<b>87,650,102,812.27</b>	110,000,000,000.00
3	PT Bank Bukopin	<b>15,625,785,791.50</b>	<b>9,374,214,208.50</b>	25,000,000,000.00
4	PT BPD NTB	20,702,726,815.00	14,297,273,185.00	35,000,000,000.00
5	PT BPD Jatim	804,863,788.64	44,195,136,211.36	45,000,000,000.00
	Jumlah	88,414,341,985.05	166,585,658,014.95	255,000,000,000.00

- c. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2009 s.d 2011 (audited) dan tahun 2012 (unaudited) menunjukkan bahwa saldo dana SP3 yang disajikan dalam Akun Aset Lain-lain tidak berubah yaitu sebesar Rp. 161.017.989.746,00. Jumlah tersebut berbeda dengan saldo yang tercantum dalam lima rekening bank yang menampung dana SP3, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 Perbandingan Saldo Dana SP3 Menurut Bank pada Neraca

No.	No. Rekening	Saldo 2008 (Rp)	Saldo 2009 (Rp)	Saldo 2010 (Rp)	Saldo 2011 (Rp)	Saldo 2012 (Rp)
1	122-000448705-7	11.024.336.133,28	1.772.060.444,88	701.250.771,65	470.200.499,39	19.509.007,63
2	30.170.777	87.354.956.710,49	88.645.915.880,27	89.972.905.619,40	91.215.866.687,94	92.547.830.838,04
3	1.019.547.015	9.374.214.208,50	9.659.339.612,50	9.953.137.372,50	10.251.667.508,72	10.534.042.876,72
4	2.07.03.03	12.048.136.080,00	9.577.609.226,00	5.577.724.522,96	5.446.283.956,57	5.631.693.793,58
5	11199151	44.158.836.214,08	31.118.837.254,44	32.248.418.413,91	33.213.302.889,11	32.950.000,48
	<b>Jumlah</b>	163.960.479.346,35	140.773.762.418,09	138.453.436.700,42	140.597.321.541,73	108.766.026.516,45
	<b>Menurut Neraca</b>	161.017.989.746,00	161.017.989.746,00	161.017.989.746,00	161.017.989.746,00	161.017.989.746,00
	<b>Perbedaan</b>	2.942.489.600,35	(20.244.227.327,91)	(22.564.553.045,58)	(20.420.668.204,27)	(52.251.963.229,55)

Satker P2P pada Setjen Kementerian Pertanian masih mencatat dan menyajikan saldo SP3 sebesar Rp. 161.017.989.746,00 meskipun satker tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2010. Saldo tersebut berasal dari saldo Laporan Keuangan Tahun 2009 (audited) dan sejak disajikan tidak disesuaikan dengan mutasi saldo rekening SP3, karena dokumen sumber pencatatan baik dari Bank maupun dari Ditjen PSP tidak diterima.

- d. Hasil penelusuran Tim Setjen Kementerian Pertanian yang dibentuk pada tahun 2013 menunjukkan bahwa transaksi yang terekam dalam rekening koran tahun 2009 s.d. 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Mutasi Rekening SP3 pada Lima Bank Pelaksana Tahun 2009 s.d. 2012

No.	No. Rekening	Saldo 2008 (Rp)	Mutasi Kredit (Rp)	Mutasi Debet (Rp)	Saldo 2012 (Rp)
1	122-000448705-7	11.024.336.133,28	231.582.350,39	11.236.409.476,04	19.509.007,63
2	30.170.777	87.354.956.710,49	6.645.558.477,55	1.452.684.350,00	92.547.830.838,04
3	1.019.547.015	9.374.214.208,50	1.159.828.668,22	-	10.534.042.876,72
4	2.07.03.03	12.048.136.080,00	1.968.178.727,94	8.384.621.014,36	5.631.693.793,58
5	11199151	44.158.836.214,08	3.764.194.447,56	47.890.080.661,16	32.950.000,48
	<b>Jumlah</b>	163.960.479.346,35	13.769.342.671,66	68.963.795.501,56	108.766.026.516,45

Setelah hasil penelusuran data pada ke 5 (lima) bank penjaminan, maka telah dilakukan serah terima pencatatan Dana Skim SP3 dari Sekretariat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Hari Kamis Tanggal 3 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 108.766.026.516,45.

Sesuai Berita Acara Serah Terima Pencatatan Dana SP3 antara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 3937/TU.210/A/10/2013 Tanggal 3 Oktober 2013

sebesar Rp. 108.766.026.516,45 serta sesuai hasil verifikasi dengan ke 5 (lima) Bank Penjaminan mengenai saldo akhir Dana Penjaminan SP-3 sebesar Rp. 108.774.952.718,86. Ada perbedaan angka yang signifikan dimana berdasarkan BAST dengan hasil rekonsiliasi dengan 5 bank pelaksana sebesar Rp. 8.926.202,41 yang merupakan selisih saldo rekening pada Bank PBD NTB per 31 Desember 2012 sesuai dengan hasil klarifikasi dan rekonsiliasi Perkembangan dana SP-3 pada 5 (lima) bank pelaksana dari bulan Januari 2013 s.d Desember 2013 sebagai berikut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saldo dana penjaminan SP-3** pada awal januari 2013 sebesar Rp. 108.774.952.718,86 Sedangkan saldo pada akhir bulan Desember 2013 sebesar Rp. 15.830.840.346,96
2. **Dana SP-3 yang telah disetor ke Bendahara Umum Negara** dari bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 91.699.534.371,-
3. **Biaya-biaya** yang telah dikeluarkan dari bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 283.119.725,86 yang terdiri dari:
  - Biaya pajak Rp. 281.930.725,86
  - Biaya administrasi , materai, dll Rp. 1.189.000,-
4. **Jasa Giro** sebesar Rp. 1.906.175.297,00
5. **Piutang Subrogasi/ kredit macet dana SP-3** pada awal Januari 2013 sebesar Rp. 8.418.020.919,46 sedangkan posisi pada akhir bulan Desember 2013 sebesar Rp. 11.285.654.491,73

Pada LHP BPK-RI jasa giro yang belum di setor pada kurun waktu tahun 2009 s/d 2012 sebesar Rp. 6.521.924.721 ,46. Sedangkan hasil rekonsiliasi Ditjen PSP dengan ke 5 (lima) Bank Penjaminan sebesar Rp. 6.256.997.099,83. Pada periode 31 Desember 2013 Jasa Giro menjadi 1.906.175.297,00. Bahwa telah ada progress/tindaklanjut dari LHP BPK-RI tahun 2012 secara signifikan.

Rincian perkembangan dana SP-3 berupa laporan mutasi saldo dana SP-3 serta laporan perkembangan piutang subrogasi dari bulan Januari s/d Desember 2013, terlampir.

**D.2.2.** Temuan BPK Asset Ex. Pusat Pembiayaan Kementerian Pertanian sebesar

43.392.603 telah di tindaklanjuti dengan pengajuan penghapusan dan sudah keluar SK Penetapan Penghapusan No. 09/KPTS/PL.420/1/2013 Tanggal 03 Januari 2013 . sudah dilakukan koreksi pencatatan di semester I th 2013.

D.2.3.Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atas sistim pengendalian intern Kementerian Pertanian tahun 2012 nomor : 22.B/LHP/XVII/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang selisih saldo SAK dan SIMAK BMN pada satker sebesar perbedaan (negatif) : -6.900.203.285, perbedaan (positif) : 1.244.451.890, dapat kami jelaskan bahwa nilai perbedaan tersebut sudah kami tindak lanjuti dengan hasil sudah tidak ada perbedaan antara nilai SAK dengan SIMAK BMN pada masing-masing satker (bukti terlampir).

D.2.4. Temuan BPK LHP atas Laporan Keuangan Kementan Th 2012 Nomor 22 A/LHP/XVII /05/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang sistim pengendalian aset ( Pencatatan dan Pelaporan saldo Persediaan pada 6 Eselon I senilai Rp. 227.990.555.074 tidak memadai ). Temuan masalah persediaan tersebut sudah kami tindaklanjuti dengan hasil ,dari 26 satker in aktif yang menjadi obyek temuan semuanya sudah menerbitkan surat yang menyatakan bahwa di satker tersebut persediaannya sudah nihil dan dilampiri BA Opname fisiknya (bukti terlampir).

d.2.5. Sudah dilakukan serahterima barang hasil kegiatan LOAN IDB dari belanja barang AKUN 526114 sebesar 81.047.487.000,- Nomor BAST 648.3/PL.140/B.1/06/2013 Tanggal 19 Juni 2013 dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dengan Kepala Dinas Pertanian TPH Prop. Aceh atas nama Gubernur Aceh Hasil temuan BPK tahun 2012 tentang kegiatan LOAN IDB untuk penggunaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat senilai 81.047.487.000,- pada satker Dinas Pertanian TPH Prop. Aceh yang tidak sesuai dengan kode AKUN standar dan sudah dilakukan input kedalam aplikasi SIMAK BMN. Tahun 2013 Ditjen PSP sudah membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pidie ( 5 kecamatan) dan Pidie Jaya ( 4 kecamatan ).

Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam <Lampiran 20>.

### D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam <Lampiran 21>.

### D.4 REKENING PEMERINTAH

Daftar Rekening pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam (lampiran 22)

## PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

### I. KOREKSI PAGU ANGGARAN

Pada TA. 2013 pagu anggaran APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.3.426.093.896.000,00, pagu anggaran tersebut merupakan pagu terakhir berdasarkan DIPA Revisi ke-2 tanggal 24 September 2013. Kronologis revisi DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1. DIPA awal Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 Rp. 3.773.473.024.000,00 terdiri dari :

Kegiatan	<b><u>3,773,473,024,000</u></b>
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	965,309,695,000
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1,845,598,579,000
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan	189,380,000,000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	191,255,850,000
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	163,703,900,000
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP	418,225,000,000
Sumber Dana	<b><u>3,773,473,024,000</u></b>
Rupiah Murni	3,751,691,724,000
Pinjaman Luar Negeri	19,993,800,000
Rupiah Murni Pendamping	1,787,500,000
Jenis Belanja	<b><u>3,773,473,024,000</u></b>
Pegawai	22,847,431,000
Barang	599,134,848,000
Modal	9,547,345,000
Bantuan Sosial	3,141,943,400,000

2. DIPA Revisi ke-2 Revisi ke-2 tanggal 24 September 2013 sebesar Rp. 3.426.093.896.000,00, terdiri dari :

Kegiatan	<b>3,426,093,896,000</b>
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	755,932,370,000
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1,789,596,099,000
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan	160,059,500,000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	162,617,687,000
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	162,544,600,000
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP	395,343,640,000
Sumber Dana	<b>3,426,093,896,000</b>
Rupiah Murni	3,404,312,596,000
Pinjaman Luar Negeri	19,993,800,000
Rupiah Murni Pendamping	1,787,500,000
Jenis Belanja	<b>3,426,093,896,000</b>
Pegawai	22,847,431,000
Barang	545,042,182,000
Modal	10,150,545,000
Bantuan Sosial	2,848,053,738,000

Pada revisi ke-02 terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 347.379.128.000,00 yang merupakan penghematan pada belanja Barang AKUN 52 sebesar Rp. 54.092.666.000,00; Belanja Bansos AKUN 573 sebesar Rp. 293.896.662.000,00

## II. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Adalah pengungkapan mengenai kewajiban untuk mengakui adanya kemungkinan terjadinya utang kepada pihak ketiga yang disebabkan adanya tuntutan hukum kepada Kementerian Pertanian yaitu pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan nilai tuntutan material.

Dalam hal ini adalah gugatan yang dilakukan oleh pemenang lelang pengadaan an penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012. Dapat diuraikan sebagai berikut :

No. Gugatan	:	440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Penggugat	:	Maman Rukmana, bertindak a.n. PT Lestari Cipta Anugerah
Tergugat	:	1. PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida pada Satker Lingkup Direktorat PSP Kementan TA 2012 2. Menteri Pertanian
Nilai	:	Rp51.917.600.000,00 terdiri dari Rp50.917.600.000,00 kerugian materiil dan Rp1.000.000.000,00 kerugian immateriil
Ringkasan Kasus	:	PT Lestari Cipta Anugerah merupakan pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 yang telah diikat dalam kontrak kerja sama dengan pihak Tergugat yang termuat dalam Surat Kontrak No.07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012 Kontrak berlaku 77 hari kalender dan berakhir tanggal 16 Sept 2012. Namun tanggal 16 Agustus 2012 pihak Tergugat membatalkan kontrak kerja sama



Alasan pembatalan lelang adalah adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Unpad Fak.MIPA, Jur.Biologi Laboratorium Mikrobiologi diragukan keabsahannya. Alasan lainnya karena persyaratan stok 40%. Perkara ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah melalui Putusan Sela jenis putusan interlukotoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara, seperti putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat (descente).